

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap program kegiatan yang direncanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Pemerintahan Kecamatan Doko

Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Doko lima tahunan sudah direncanakan melalui Rencana Strategis Kecamatan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Doko Kabupaten Blitar dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan. Namun, setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Doko Kabupaten Blitar.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Saran dan pendapat serta kritik yang membangun dari pengguna LKjIP ini untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan tahun berikutnya akan kami terima dengan senang hati. Akhirnya apa yang dapat tersaji ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.

Doko, Februari 2025


CAMAT DOKO

M. NUR ANDY AZIS, SP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 197209141998031005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LkjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LkjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong perwujudan *good governance* serta fungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Kecamatan Doko, maka LKjIP Kecamatan Doko yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2024 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala SKPD kepada Bupati Blitar.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Doko Tahun 2024 adalah memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Doko yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Blitar maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Adapun tujuan disusunnya

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Doko tahun 2024 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Blitar khususnya Kecamatan Doko;
3. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya dan sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

1.3 Gambaran Umum

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, ditetapkan tugas Camat adalah :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Camat dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun kebijakan teknis operasional kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. menyelenggarakan pembinaan wilayah;
- d. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;

- e. melaksanakan pelayanan publik;
- f. menyusun laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Doko Tahun 2024 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar);
7. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Doko Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum
 - 1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1.3.2 Struktur Organisasi
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 1.1 Rencana Strategik
- 1.2 Visi
- 1.3 Misi
- 1.4 Perjanjian Kinerja
- 1.5 Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra organisasi

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

3.1.5 Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

3.1.6 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. MATRIK RENSTRA

B. PERJANJIAN KINERJA

C. LAMPIRAN LAINYA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Hal-hal yang harus dilakukan oleh organisasi dalam merumuskan dan mempersiapkan perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

1. Menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai. Hal ini dapat diartikan bahwa perencanaan strategis merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi terutama dalam pencapaian tujuan akhir organisasi.
2. Mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan interaksinya, terutama cakupan dan kualitas pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh organisasi kepada masyarakat.
3. Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam positioning organisasi dalam membangun kepercayaan pelanggan.
4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi.
5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian implementasi perencanaan strategis.

Langkah-langkah di atas merupakan acuan umum yang harus dilakukan oleh setiap organisasi dalam merumuskan dan mempersiapkan perencanaan strategik. Dalam praktiknya, setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategik untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima. Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

2.1. VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi. Visi yang sangat tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut termasuk perancangan rencana strategis secara keseluruhan, pengeloaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang akan diintegrasikan oleh instansi tersebut.

Dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Blitar yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Doko mendukung visi Pemerintah Kabupaten Blitar periode 2021-2026 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia (Baladatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur)”.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.

MISI 2 “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.

MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

MISI 4 “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Kecamatan Doko melaksanakan dua misi dari empat misi RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 yaitu misi kesatu dan ketiga. Pada Misi kesatu yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya dan untuk mewujudkan misi ketiga yaitu Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk penetapan rencana kinerja tahunan, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja.

Tujuan penetapan IKU meliputi :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan Kearifan Lokal Budaya”, maka tujuan pembangunan yaitu “Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat” dibentuk dari sasaran :

- a. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- b. Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni “Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas”, maka tujuan pembangunan ditetapkan “Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas”, yang dibentuk dari sasaran pembangunan :

- a. Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa.

- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Berdasarkan pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut maka Kecamatan Doko menentukan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat dengan indikator kinerja “Indeks Kesalehan Sosial”.
2. Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator Predikat Sakip Perangkat Daerah dan Persentase Desa Mandiri di kecamatan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing - masing). Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kecamatan Doko Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2024, ditetapkan sasaran- sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa dengan indikator sasaran Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti;
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator sasaran Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang dapat diselesaikan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
4. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator sasaran persentase desa yang memiliki administrasi baik dan jumlah bumdes yang dikelola dengan baik;

Dari uraian diatas maka ditetapkan IKU Kecamatan Doko sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Desa Yang Naik Kelas
		Persentase desa mandiri di kecamatan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah
3	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan
4	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti

Sumber: Data yang sudah diolah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Doko adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional
1	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat Sakip Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Sakip Oleh Inspektorat
3	Menurunnya Jumlah Pelanggaran di Kecamatan	Prosentase peningkatan rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	$\frac{\sum \text{rekomendasi hasil koordinasi seluruh bidang yang ditindaklanjuti tahun } n - \sum \text{rekomendasi hasil koordinasi seluruh bidang yang ditindaklanjuti tahun } n-1}{\sum \text{rekomendasi hasil koordinasi seluruh bidang tahun } n-1} \times 100 \%$
4	Meningkatkan kemandirian desa dan kelurahan di wilayah kecamatan	Jumlah Desa Yang Naik Kelas	$\frac{\sum \text{desa admin baik tahun } n - \sum \text{desa admin baik tahun } n-1}{\sum \text{desa admin baik tahun } n-1} \times 100 \%$
		Prosentase Desa Mandiri di Kecamatan	$\frac{\sum \text{Desa Mandiri}}{\sum \text{Desa}} \times 100\%$

2.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi. Visi yang sangat tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut termasuk perancangan rencana strategis secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang akan diintegrasikan oleh instansi tersebut.

Dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Blitar yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Doko mendukung visi Pemerintah Kabupaten Blitar periode 2024-2026 sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)”**.

2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi memberi gambaran alasan yang menjelaskan jati diri sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar 2024-2026 diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar
Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.”

Misi ke-1 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada PPKS, masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, religius serta berbudi di Kabupaten Blitar. Dengan harmonisasi sosial diharapkan masyarakat dapat saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan tetangga terdekatnya.

MISI 2 “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu
dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi
generasi muda Kabupaten Blitar.”

Misi ke-2 Kabupaten Blitar terfokus pada meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah meningkatnya pembangunan manusia. Peningkatan pembangunan manusia

tercapai melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas dan akses kesehatan masyarakat, dan peningkatan pembangunan gender.

MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.”

Misi ke-3 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan adalah terciptanya Reformasi Birokrasi yang berkualitas. Reformasi Birokrasi yang berkualitas adalah melalui peningkatan inovasi layanan berbasis digital, peningkatan profesionalitas aparatur dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

MISI 4 Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Misi ke-4 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar yang didukung oleh terciptanya kondusivitas daerah. Representasi tercapainya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah terciptanya penurunan kesenjangan ekonomi antar kelas, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur. terciptanya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah melalui peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan daya saing pariwisata, peningkatan investasi daerah, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana.

Dalam hal ini kecamatan melaksanakan amanat Misi Ke-1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya dan Misi ke-3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas”.

2.3 Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Kecamatan Doko menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Kecamatan Doko. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Doko Tahun 2024. Target Kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan Kecamatan Doko di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target sasaran untuk tahun 2024 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai pada tahun 2024.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Kec. Doko

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024
1.	Jumlah Desa Yang Naik Kelas	2
2.	Persentase desa mandiri di kecamatan	40%
3.	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	B
4.	Jumlah penurunan pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan	85%
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Camat Doko dengan Bupati Blitar untuk mewujudkan target kinerja tahun keempat dari Renstra Kecamatan Doko. Berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Doko. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Doko. Pada dasarnya perjanjian kinerja tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kecamatan Doko selama tahun 2024.

Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya. Dokumen Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja Kecamatan Doko Tahun 2024 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Doko tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Doko Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan public hingga ke desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B
3	Meningkatkan kemandirian desa dan kelurahan di wilayah kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan Yang Naik Kelas	2
		Prosentase Desa Mandiri di Kecamatan	40%
4	Menurunnya Jumlah Pelanggaran di Kecamatan	Penurunan Jumlah Pelanggaran di Kecamatan	85%

2.5 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 4 program dan 12 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.296.054.683,00 Empat Sasaran Strategis tersebut merupakan arahan bagi Kecamatan Doko untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Derah Kabupaten/Kota merupakan program untuk mencapai indikator kinerja prosentase kepuasan aparatur dalam hal tersedianya dan peningkatan administrasi perkantoran yang meliputi ketatalaksanaan, ketatusahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.

 - 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2. Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program untuk mencapai indikator kinerja jumlah fasilitasi yang dilaksanakan. Terdiri dari kegiatan:

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
- Kegiatan yang dilaksanakan :
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program dan kegiatan diatas mendapatkan alokasi per sasaran pembangunan dan akan lebih jelas dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Alokasi Dana Tahun 2024

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
								DPPA Tahun 2024	
								Target Kinerja	Anggaran (Rp)
X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada progrsm penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	2.136.042.183
X	XX	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Persen	100	3.117.138
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	1.598.418
X	XX	01.	2.01	07	Evaluasi Kinnerja Perangkat Daerah				1.518.720
X	XX	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Persen	100	1.500.967.183
X	XX	1	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10	1.462.342.183
X	XX	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	37.275.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
								DPPA Tahun 2024	
								Target Kinerja	Anggaran (Rp)
X	XX	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD				1.350.000
X	XX	1	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	93.880.000
X	XX	01	1.05	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dann Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Penndidikann dan Pelatihan	Orang	14	93.880.000
X	XX	1	2.06		Kegiatan Administraasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Persen	100	134.728.482
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.649.682
X	XX	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	40.934.344
X	XX	1	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3.002.994
X	XX	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.376.278
X	XX	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3.864.652

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
								DPPA Tahun 2024	
								Target Kinerja	Anggaran (Rp)
X	XX	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	72.898.656
X	XX	01	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	Persen	100	168.847.508
X	XX	01.	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	63.515.088
X	XX	01.	1.07	07	Bangunan Gedung Kantor Lainnya				105.332.420
X	XX	01	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Persen	100	127.813.872
X	XX	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	9.387.200
X	XX	1	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	118.426.672
X	XX	01	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	106.890.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
								DPPA Tahun 2024	
								Target Kinerja	Anggaran (Rp)
X	XX	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lpanngan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6	67.200.000
X	XX	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	34.000.000
X	XX	01	1.09	08	PemeliharaanPeralatan Mesinn Lainnya		unit	0	5.490.000 -
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	Persen	100%	17.750.000
7	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kec.	Jumlah Layanan yang dilaksanakan	Jenis	4	2.250.000
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	2.250.000
7	01	02	2.01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Layanan yang dilaksanakan	Jenis	4	15.500.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
								DPPA Tahun 2024	
								Target Kinerja	Anggaran (Rp)
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanakan Kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.500.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	kegiatan	5	23.182.600
7	1	3	2.01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	kali	5	23.182.600
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	12.457.500
7	1	3	2.08		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	kali	5	30.945.000
7	01	03	2.08	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				30.945.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
								DPPA Tahun 2024	
								Target Kinerja	Anggaran (Rp)
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Peraturan perundang-undangan desa yang dibuat	DOKUMEN	20	43.155.000
7	01	06	2.01		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan	kali	12	43.155.000
7	1	6	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	dokumen	12	18.405.000
7	1	6	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	12	17.100.000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan di Wilayahnya	Jumlah Dokumen	dokumen	12	7.650.000
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	kegiatan	5	55.705.000
7	01	04	2.01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kali	15	55.705.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Laporan	3	41.005.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
								DPPA Tahun 2024	
								Target Kinerja	Anggaran (Rp)
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Toga dan Tomas	Jumlah Koordinasi			14.700.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Doko merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Doko Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Doko. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

3.1 Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Lalu

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result-oriented government). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Doko menunjukkan nilai sebesar 54,64 dengan predikat "CC"

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja berdasarkan kelompok input, outputs dan outcomes. Menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Capaian kinerja organisasi pada tahun 2024 sesuai dengan kinerja yang diperjanjikan dianalisis sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa

- Capaian Kinerja Tahun 2024 :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Camat	100	87,22

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan public sampai ke desa dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat. Yang dimaksud Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Doko melalui aplikasi E-Sukma Jatim. Pada tahun 2024 menargetkan 100 dan tercapai 87,22 hal ini sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh Bagian Pelayanan Kecamatan Doko dengan responden pengguna layanan di kecamatan Doko

- **Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024
Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,90	87,22	91,9	87,22

Jika dibandingkan antara realisasi tahun 2022 dan 2024 terlihat bahwa capaian realisasi terdapat sedikit penurunan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari bagian Pelayanan Kecamatan Doko untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam bidang pelayanan public dan membuat inovasi-inovasi baru agar kepuasan masyarakat dapat lebih tinggi di tahun berikutnya.

- **Perbandingan realisasi kinerja sampai akhir Periode RENSTRA**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kema juan
Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	87,22	-12,78%

Tabel di atas menggambarkan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Renstra) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Terdapat indikator sasaran yang kurang memenuhi target jangka menengah yaitu pada sasaran Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa. Sehingga perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari tim penyusun Renstra Kecamatan Doko untuk dapat melakukan penyesuaian pada target, yaitu dengan menurunkan target yang ditetapkan pada renstra periode berikutnya.

• **Perbandingan realisasi kinerja kec. Doko dengan Kecamatan lain**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kec. Doko	Realisasi Kec. Talun	Realisasi Kec. Sanankulon
Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,22	-	97,13

Dari Tabel perbandingan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kecamatan Doko perlu memperhatikan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang masih berada di bawah Kecamatan Sanankulon. Sedangkan kecamatan Talun tidak memasang target Indeks Kepuasan Masyarakat sehingga datanya tidak dapat disandingkan.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

Secara umum beberapa hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja diantaranya :

- a. Adanya Komitmen Pimpinan dalam memantau dan mengawal pelaksanaan kegiatan, mengawal permasalahan dan aduan yang masuk dari masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
- b. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- c. Koordinasi rutin antara camat, sekretaris, kasi dan staf untuk mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga diketahui permasalahan yang ada dan cara pemecahan terbaiknya.
- e. Dilakukannya koordinasi lintas instansi untuk sinergitas program/kegiatan

Disamping itu, ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan di

kecamatan Doko selama Tahun 2024 juga memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi tercapainya target kinerja kecamatan.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

- Capaian Kinerja Tahun 2024 :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	Camat	90%	100%

Sasaran Strategis “Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum” dengan indicator Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan. Yang dimaksud Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang dapat diselesaikan, adalah hasil dari jumlah gangguan trantibum yang dapat diselesaikan tahun ke-n dibagi jumlah seluruh gangguan trantibum tahun ke-n yang hasilnya dikalikan 100%. Adapun gangguan trantibum yang dimaksud adalah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di wilayah kecamatan Doko pada tahun ke-n. Pada tahun 2024 targetnya 90% tercapai 100%. Seluruh gangguan trantibum di wilayah Kecamatan Doko dapat ditangani dengan baik. Adapun data gangguan trantibum selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tabel Data Gangguan Trantibum Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Gangguan Trantibum	Jumlah Gangguan trantibum yang belum diselesaikan	Jumlah Gangguan trantibum yang diselesaikan
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	1	-	1
6	Juni	0	-	0
7	Juli	1	-	1
8	Agustus	-	-	-
9	September	1	-	1

10	Oktober	0	-	0
11	Nopember	1	-	1
12	Desember	0	-	0
Jumlah		4	-	4

Sumber : Kasi Trantib Kec Doko

• **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	Camat	90%	100%	100%

Dari tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja adalah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan Kecamatan Doko telah melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan telah berdaya upaya sehingga koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

• **Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	85%	90%	100%	100%

Jika dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dan 2024 terlihat bahwa capaian realisasi masih stabil pada sasaran kinerja ini.

Perbandingan realisasi kinerja sampai akhir Periode RENSTRA

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kema juan
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%

Tabel di atas menggambarkan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Renstra) yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi. Pada sasaran strategis Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, gangguan trantibum diwilayah telah dapat selesai dengan baik. Sehingga tingkat kemajuan tercapai 100%. Sehingga perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari tim penyusun Renstra Kecamatan Doko untuk dapat melakukan penyesuaian pada target, yaitu dengan menaikkan target yang ditetapkan pada renstra periode berikutnya.

• **Perbandingan realisasi kinerja kec. Doko dengan Kecamatan lain**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kec. Doko	Realisasi Kec. Talun	Realisasi Kec. Sanankulon
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	100%	95%	95%

Dari Tabel perbandingan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kecamatan Doko telah dapat merealisasikan target indicator dengan baik jika dibandingkan dengan kecamatan lain di wilayah Kabupaten Blitar.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

Secara umum beberapa hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja diantaranya :

- Adanya Komitmen Pimpinan dalam memantau dan mengawal pelaksanaan kegiatan, mengawal permasalahan dan aduan yang masuk dari masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
- Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- Koordinasi rutin antara camat, sekretaris, kasi dan staf untuk mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan;
- Evaluasi atas pelaksanaan program/ kegiatan sehingga diketahui permasalahan yang ada dan cara pemecahan terbaiknya.
- Dilakukannya koordinasi lintas instansi untuk sinergitas program/kegiatan

Disamping itu, ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan Doko selama Tahun 2024 juga memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi tercapainya target kinerja kecamatan.

• Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%

Dari data di atas dapat diperoleh informasi bahwa persentase capaian kinerja dengan indikator yang telah ditetapkan sebesar 100% dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 99%. Sehingga diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0%.

• Analisis Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dari sasaran strategis yang ada, secara umum Program/Kegiatan yang telah dilakukan sudah menunjukkan keberhasilan dan kegiatan berjalan dengan maksimal..

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.945.000

3. Sasaran Strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

• Capaian Kinerja Tahun 2024 :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatkan akutabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Camat	BB	CC

Definisi Operasional dan formulasi penghitungan kinerja indikator Predikat Sakip Perangkat Daerah :

Sasaran strategis “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan indicator kinerja Predikat Sakip Perangkat Daerah Yang dimaksud Predikat SAKIP adalah Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Doko. Pada tahun 2024 ditargetkan perolehan predikat SAKIP di tahun 2024 adalah BB, namun berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Doko yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar sesuai dengan LHE Nomor R/700/522/409.9.4/ Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 diperoleh predikat CC.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatkan akutabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Camat	B	CC

Dari tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja melebihi target yang telah ditentukan. Namun akan menjadi perhatian pada perencanaan tahun berikutnya, tentang penetapan target dari setiap indicator. Penentuan target di tahun berikutnya akan memperhatikan realisasi target di tahun 2024 ini. Mengingat pada tahun ini Kecamatan Doko telah merealisasikan target indicator yang ditentukan jauh melebihi target renstra. Yaitu pada Indikator Predikat Sakip Perangkat Daerah.

- **Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**
-

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024
Meningkatkan akutabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	CC	66%	54,64%

Pada capaian kinerja, jika dibandingkan capaian tahun 2024 lebih tinggi pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024

memasang target yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Namun perlu mendapat perhatian dari tim penyusun renstra kecamatan Doko untuk menetapkan target di tahun berikutnya dengan memperhatikan pencapaian target tahun 2024 ini.

- **Perbandingan realisasi kinerja sampai akhir Periode RENSTRA**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024
Meningkatkan akutabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase desa mandiri di kecamatan	BB	CC

Tabel di atas menggambarkan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Renstra) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Terdapat indikator sasaran yang telah mencapai/melebihi target jangka menengah yaitu pada indicator Predikat SAKIP Perangkat Daerah. Sehingga perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari tim penyusun Renstra Kecamatan Doko untuk dapat melakukan penyesuaian pada target, yaitu dengan menaikkan target yang ditetapkan pada renstra periode berikutnya.

- **Perbandingan realisasi kinerja kec. Doko dengan Kecamatan lain**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kec. Doko	Realisasi Kec. Talun	Realisasi Kec. Sanankulon
Meningkatkan akutabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	CC	B	B

Dari Tabel perbandingan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kecamatan Doko telah dapat merealisasikan target indicator dengan baik jika dibandingkan dengan kecamatan sanankulon dan Kecamatan Sanankulon yaitu pada indicator Predikat SAKip Perangkat Daerah.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

Secara umum beberapa hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja diantaranya :

- Adanya Komitmen Pimpinan dalam memantau dan mengawal pelaksanaan kegiatan, mengawal permasalahan dan aduan yang

- masuk dari masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
- b. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
 - c. Koordinasi rutin antara camat, sekretaris, kasi dan staf untuk mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan;
 - d. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga diketahui permasalahan yang ada dan cara pemecahan terbaiknya.
 - e. Dilakukannya koordinasi lintas instansi untuk sinergitas program/kegiatan

Disamping itu, ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan Doko selama Tahun 2024 juga memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi tercapainya target kinerja kecamatan.

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- **Capaian Kinerja Tahun 2024 :**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Camat	68	54,64

Sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” yang dimaksud Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pemerintah yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar. Dimana setiap hasil akan disampaikan dan tercantum dalam Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Ditargetkan perolehan nilai hasil Evaluasi SAKIP di tahun 2025 adalah 54,64 namun berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Doko yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar sesuai dengan LHE Nomor R/700/522/409.9.4/2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinfah (AKIP) Tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 54,64.

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Camat	68,00	54,68	80,41%

Dari tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja adalah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan Kecamatan Doko telah melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan telah berdaya upaya sehingga realisasi melampaui target yang ditentukan. Namun akan menjadi perhatian pada perencanaan tahun berikutnya, tentang penetapan target dari indicator. Penentuan target di tahun berikutnya akan memperhatikan realisasi target di tahun 2024 ini.

- **Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	67,76	54.60	95,92	80,29

Jika dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dan 2024 terlihat bahwa realisasi mengalami penurunan . Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 kurang koordinasi dalam kinerja

- **Perbandingan realisasi kinerja sampai akhir Periode RENSTRA**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70	54.60

Tabel di atas menggambarkan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Renstra) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pada sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah hampir tercapai target renstra yang telah ditentukan.

- **Perbandingan realisasi kinerja kec. Doko dengan Kecamatan lain**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kec. Doko	Realisasi Kec. Talun	Realisasi Kec. Sanankulon
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	54,60	62,21	62,49

Dari Tabel perbandingan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kecamatan Doko belum dapat merealisasikan target indicator dengan baik jika dibandingkan dengan kecamatan Talun dan Sanankulon.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

Secara umum beberapa hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja diantaranya :

- a. Adanya Komitmen Pimpinan dalam memantau dan mengawal pelaksanaan kegiatan, mengawal permasalahan dan aduan yang masuk dari masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
- b. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- c. Koordinasi rutin antara camat, sekretaris, kasi dan staf untuk mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga diketahui permasalahan yang ada dan cara pemecahan terbaiknya.
- e. Dilakukannya koordinasi lintas instansi untuk sinergitas program/kegiatan

Disamping itu, ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan Doko selama Tahun 2024 juga memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi tercapainya target kinerja kecamatan.

- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Doko menggunakan perbandingan prosentase capaian kinerja dengan prosentase penyerapan anggaran. Penggunaan berbagai sumber daya telah dilakukan dengan melakukan efisiensi tanpa mengurangi jumlah tugas yang dilakukan. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang

dapat digambarkan sebagai berikut :

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,29%	95,39%	15,1%

• **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dari sasaran strategis yang ada, secara umum Program/Kegiatan yang telah dilakukan sudah menunjukkan keberhasilan dan kegiatan berjalan dengan maksimal. Yang menjadi faktor penunjang adalah program/kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin kantor. Alokasi kegiatan Program Utama dan Penunjang lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	% Anggaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.136.042.183	93,3%

5. **Sasaran Strategis Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa**

• **Capaian Kinerja Tahun 2024 :**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja		Target	Realisasi
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah desa yang naik kelas	Camat		2	2
	Jumlah desa mandiri	Camat		80%	40%

Sasaran strategis “Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa” terdapat dua indicator. Yang pertama jumlah desa yang naik kelas Sedangkan yang kedua yaitu indicator

Jumlah Desa Mandiri

-

• **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah desa yang naikkelas	Camat	2	100%	100%
	Jumlah desa Mandiri	Camat	40	100	100%

Dari tabel tersebut akan menjadi perhatian pada perencanaan tahun berikutnya, tentang penetapan target dari setiap indicator. Penentuan target di tahun berikutnya akan memperhatikan realisasi target di tahun 2024 ini. Mengingat pada tahun ini Kecamatan Doko telah merealisasikan target indicator yang ditentukan kurang dari target renstra. Yaitu pada Indikator Persentase desa mandiri di kecamatan.

• **Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah desa yang naik kelas	2%	2%	100%	100%
	Jumlah desa mandiri	4	4	100%	100%

Pada capaian kinerja, jika dibandingkan capaian tahun 2023 lebih rendah pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 memasang target yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Namun perlu mendapat perhatian dari tim penyusun renstra kecamatan Doko untuk menetapkan target di tahun berikutnya dengan memperhatikan pencapaian target tahun 2024 ini. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kema juan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah desa yang naik kelas	2	2	100%
	Jumlah desa mandiri	8	4	100%

Tabel di atas menggambarkan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Renstra) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Terdapat indikator sasaran yang kurang mencapai target jangka menengah yaitu pada indicator Jumlah desa mandiri di kecamatan. Sehingga perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari tim penyusun Renstra Kecamatan Doko untuk dapat melakukan penyesuaian pada target

- **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan realisasi kinerja kecamatan lain di wilayah Kabupaten Blitar**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kec. Doko	Realisasi Kec. Talun	Realisasi Kec. Sanankulon
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah desa yang memiliki administrasi baik	2		3
	Jumlah Desa Mandiri di Kecamatan	4		

Dari Tabel perbandingan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kecamatan Doko telah dapat merealisasikan target indicator dengan baik jika dibandingkan dengan kecamatan sanankulon .
Sedangkan dengan kecamatan Talun tidak dapat disandingkan karena Kec Talun tidak memasang target ini.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

Secara umum beberapa hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja diantaranya :

- Adanya Komitmen Pimpinan dalam memantau dan mengawal pelaksanaan kegiatan, mengawal permasalahan dan aduan yang masuk dari masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat

- dan tepat.
- b. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
 - c. Koordinasi rutin antara camat, sekretaris, kasi dan staf untuk mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan;
 - d. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga diketahui permasalahan yang ada dan cara pemecahan terbaiknya.
 - e. Dilakukannya koordinasi lintas instansi untuk sinergitas program/kegiatan

Disamping itu, ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan Doko selama Tahun 2024 juga memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi tercapainya target kinerja kecamatan.

3.1.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1.7

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah desa yang memiliki administrasi baik	20%	100%	-80%
	Jumlah desaMandiri	40%	86,89%	46,89%

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dari sasaran strategis yang ada, secara umum Program/Kegiatan yang telah dilakukan sudah menunjukkan keberhasilan dan kegiatan berjalan dengan maksimal. Yang menjadi faktor penunjang adalah program/kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin kantor. Alokasi kegiatan Program Utama dan Penunjang lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	% Anggaran
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah desa yang memiliki administrasi baik	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.155.000	1,87%
	Jumlah Desa Mandiri di Kec	Program Pemberdayaan	12.457.500	4,8%

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	% Anggaran
		Masyarakat Desa dan Kelurahan		

Disamping beberapa factor keberhasilan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian indikator sasaran-sasaran strategis Kecamatan Doko, serta alternatif solusi pemecahan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada

Sebagai miniatur Pemerintah Daerah di wilayah, sudah seharusnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada (harus) dipilihkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) berkualitas yang ada di Kabupaten Blitar. Mengingat Kecamatan adalah perangkat daerah yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat. Kompleksnya berbagai pekerjaan di Kecamatan harus berbanding lurus dengan aparatur yang ada. Jumlah jabatan pelaksana (staf) yang ada di kecamatan masih belum memadai/ tidak mencukupi kebutuhan organisasi dan masih sangat jauh dari kebutuhan sesuai dengan Analisa jabatan yang ditetapkan. Seluruh Kasi di Kecamatan Doko belum memiliki staf. Dan sudah diajukan permohonan penambahan personal tetapi sampai saat ini masih belum ada realisasi dari Pemerintah Kabupaten Blitar.

b. Masih kurangnya kegiatan Peningkatan Kapasitas untuk personal Kecamatan Doko

Kegiatan peningkatan kapasitas hendaknya lebih intens difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui dinas/OPD pengampu, mengingat saat ini hamper seluruh kegiatan di Pemerintahan menggunakan aplikasi dan berbasis web. Dengan kondisi SDM di wilayah masih kesulitan dalam mengikuti perkembangan tersebut mengingat usia Pegawai sudah mendekati pensiun dan sulit untuk menyesuaikan diri. Diharapkan dengan diadakannya Bimbingan Teknis yang berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan SDM di Kecamatan Doko sehingga dapat tercapai target yang telah direncanakan.

c. Masih sedikitnya pagu anggaran Kecamatan Doko

Pagu yang dikelola oleh Kecamatan Doko di Tahun 2024 sebesar Rp 2.296.054.683 sudah termasuk Gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 1.462.342.183, sehingga dapat diketahui anggaran untuk kegiatan sebesar Rp 833.712.500. Anggaran tersebut digunakan untuk membiaya kegiatan penunjang dan kegiatan kewilayahan. Mengingat tugas dan fungsi kecamatan yang begitu kompleks, anggaran tersebut kurang mencukupi untuk membiayai kegiatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kecamatan di wilayah, sehingga capaian target kinerja kurang maksimal karena keterbatasan biaya tersebut. Diharapkan untuk tahun berikutnya diadakan penambahan pagu anggaran kegiatan Kecamatan Doko.

Seluruh hasil evaluasi dan hal-hal yang menjadi penghambat pencapaian kinerja akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya (Tahun 2024) sebagai bentuk perbaikan kinerja agar lebih baik dimasa mendatang.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian kinerja sasaran strategis sebagaimana dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja seluruhnya telah tercapai dengan baik. Hal ini tentunya dihasilkan dari komitmen pimpinan untuk terus memantau dan mengawal pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Doko. Serta pelaksanaan pengukuran berjenjang dari bawah ke atas, mulai dari pelaksana kegiatan hingga pimpinan organisasi sehingga indicator dan target yang telah diperjanjikan dapat terwujud.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran pada Satuan Kerja Kecamatan Doko memiliki pencapaian kinerja baik (>80%) dan mencapai kinerja sesuai target sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Capaian per jenis belanja

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.598.418,00	1.350.000,00	84,46
2	Evalausi Kinerja Perangkat Daerah	1.518.720,00	1.350.000,00	88,89
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Belanja Gaji dan Tunjangan	1.454.132.883,00	1.389.781.622,00	95,57

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
4	ASN Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.275.000,00	37.275.000,00	100,00
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.880.000,00	93.350.000,00	98,38
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.649.682,00	1.644.000,00	88,23
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.934.220,00	36.331.556,00	94,89
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.002.994,00	2.056.000,00	100,00
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.376.278,00	10.862.000,00	100,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.864.652,00	2.617.500,00	99,98
12	Penyelenggaraan Rapat koordinasi & Konsultasi SKPD	72.898.656,00	68.932.447,00	89,83
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.515.088,00	58.150.000,00	100,00
14	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.332.420,00	103.242.000,00	99,33
15	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	9.387.200,00	6.187.820,00	51,09
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.426.672,00	113.967.602,00	97,14
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000,00	67.192.425,00	99,93
18	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	5.490.000,00	5.490.000,00	63,69
19	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	34.000.000,00	32.604.000,00	99,96
20	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.500.000,00	15.500.000,00	86,53
21	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12.457.500,00	12.457.500,00	100,00
23	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat	30.945.000,00	30.225.000,00	97,67

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	Kesehatan Keluarga dan lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
24	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	41.005.000,00	36.445.000,00	96,69
24	Harmonisasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.700.000,00	14.250.000,00	89,30
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.155.000,00	37.500.000,00	86,89
25	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18.405.000,00	16.200.000,00	96,55
26	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.100.000,00	15.225.000,00	94,44
27	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.650.000,00	6.075.000,00	73,61
	Total	2.287.845.383,00	2.182.391.472,00	95.39

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indika tor Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Tar get	Realis si	Capai n	Alokasi (Rp)	Realisas i	Capaian
Meningkatnya kemandirian desa dan kelurahan di wilayah kecamatan	Jumlah Desa Yang Naik Kelas	2	2	2	55.630.000	49.957.500	89,80
	Persen tase desa mandiri di kecamatan	40 %	40%	100 %			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predik at SAKIP peran gkat daera h	BB	B	B	2.136.042.183	2.063.958.972	96,62%
Menurunnya Jumlah Pelanggaran di Kecamatan	Penurun an Jumla h	85 %	85%	100 %	55.705.000	50.695.000	91%

	Pelan ggara n di Keca matan						
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Indeks Kepua san Masya rakat	10 0%	100 %	100 %	17.750. 000	17.750. 000	100 %
Jumlah / Rata-rata					2.287.8 45.383	2.182.3 91.472	95.3 9

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan demokratis di era globalisasi yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambar dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu kegiatan, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang ada pada Kantor Kecamatan Doko menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesainya keluaran ditahun berjalan. Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan LKJIP, maka dibanding antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

Mengingat keadaan keuangan pemerintah yang masih kurang sehingga dana yang dialokasikan untuk kegiatan belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. Masih adanya pagu anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan pagu anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Kecamatan Doko untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan harus sesuai dengan RKA yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Akhirnya dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Doko yang telah dibuat bersama-sama ini dapat menjadi tolak ukur, bahan pertimbangan dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Doko, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu mewujudkan ***"Menuju Kabupaten Blitar lebih sejahtera, maju dan berdaya saing"***.

Doko, Februari 2025
CAMAT DOKO

M. NUR ANDY AZIS, SP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197209141998031005